HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYIZ DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALU DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BADUNG)

Sabila Izza

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
sabilaizza6@gmail.com

Idaul Hasanah

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
idaul@umm.ac.id

Muhammad Arif Zuhri

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
arifzuhri@umm.ac.id

ABSTRACT

*The main problem in this article concerns the forced money system (dwangsong) which was determined by the judge in one of the decisions Number 407/Pdt.G/2016/PA.Pal. The purpose of this article is to identify similarities and differences in the judge's considerations in decision Number 407/Pdt.G/2016/PA.Pal and decision Number 0069/Pdt.G/2015/PA.Bdg, as well as identifying the benefit values in the two decisions. This article uses a normative juridical method with a case approach and comparison of two decisions of the Palu Religious Court Number 407/Pdt.G/2016/PA.Pal and the decision of the Badung Religious Court Number 0069/Pdt.G/2015/PA.Bdg. The results of the article show several differences in the legal basis used by judges in handing down a decision. These differences include legal facts, juridical and non-juridical considerations, the judge's interpretation, and the final decision. Apart from that, it is hoped that this research will also be able to explain how the principle of *maslahah* is applied in the Indonesian justice system, in child custody cases. It is hoped that this article can serve as a guide in deciding child custody cases, and also as input for drafting rules regarding child custody that are clearer and more impartial by prioritizing the best interests of the child.*

Keywords: *Child Custody, Comparison, Decision*

ABSTRAK

Masalah utama dalam artikel ini tentang sistem uang paksa (*dwangsong*) yang ditetapkan oleh hakim dalam salah satu putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal. Tujuan artikel ini untuk mengidentifikasi persamaan maupun perbedaan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal dan putusan Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Bdg, serta mengidentifikasi nilai *maslahat* dalam kedua putusan tersebut. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perbandingan dari dua putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal dan putusan pengadilan Agama Badung Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Bdg. Hasil artikel menunjukkan beberapa perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan. Perbedaan tersebut meliputi fakta hukum, pertimbangan yuridis dan non-yuridis, penafsiran hakim, serta putusan akhir. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga mampu untuk menjelaskan bagaimana prinsip *maslahah* diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia, dengan perkara hak asuh anak. Artikel ini diharap dapat menjadi panduan dalam memutuskan perkara hak asuh

anak, dan juga sebagai masukan untuk menyusun aturan tentang hak asuh anak yang lebih jelas dan berpihak dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Perbandingan, Putusan

PENDAHULUAN

Putusnya sebuah rumah tangga sering kali memunculkan akibat hukum baru, apalagi jika memiliki seorang anak yang usianya masih cukup belia, sebab anak akan kena imbasnya atas perpisahan dari kedua orang tuanya. Hak asuh anak menjadi salah satu permasalahan yang sering diperebutkan dalam perceraian rumah tangga.

Berdasarkan dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2021 tercatat sebanyak 2971 pengaduan anak menjadi korban pengasuhan bermasalah dan kasus pelanggaran tertinggi Pada kategori Keluarga dan Pengasuhan Alternatif yaitu sebesar 2281 kasus. Data kasus perlindungan anak ke KPAI sejak januari-september tahun 2023 juga tercatat sebesar 1800 pengaduan dengan kasus tertingginya yaitu Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebesar 1056 kasus. Di negara Indonesia, pengasuhan anak dalam keluarga mengalami banyak perubahan dalam struktur keluarga yang dibuktikan dengan kenaikan angka perceraian sebesar 3% pertahunnya. Dari data yang dijelaskan menunjukkan bahwa kasus hak asuh di indonesia masih cukup tinggi (KPAI, 2024).

Menurut aturan hukum yang berlaku indonesia, untuk mendapatkan hak asuh anak bagi ayah maupun ibu haruslah menempuh jalur litigasi agar mendapatkan kepastian hukum. Mengenai pembagian hak asuh anak, jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun maka secara pasti jatuh pada ibunya (Widanengsih dan Maryandi, 2022). Maka didapatkan bahwa pemeliharaan anak yang berusia 12 tahun bahkan lebih maka pengasuhan akan dikembalikan pada anaknya siapa yang menurutnya berhak mengasuhnya (Auliana, 2013). Hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1968 tentang perwalian anak, yang berbunyi bahwa perwalian anak, khususnya anak kecil diserahkan kepada ibu kandung

(Maryati, 2021). Sedangkan menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang *mumayyiz* adalah saat anak masih berusia 18 tahun atau ketika si anak belum menikah (UU No. 1, 1974).

Namun demikian, hak asuh anak tetap bisa saja berubah dari yang semestinya jatuh kepada sang ibu justru berpindah ke ayah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 41 UU Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dapat terjadi karena beberapa sebab yang telah dipertimbangkan oleh hakim (Amelia et al., 2024). Meskipun demikian belum ada undang-undang maupun pasal yang menjelaskan secara spesifik yang mengatur tentang hak asuh setelah perceraian diberikan kepada ibu ataupun ayah. Hakim Pengadilan dapat memberikan hak asuh kepada ayah dengan beberapa pertimbangan, diantaranya sanggup untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, kemudian mampu untuk memenuhi kebutuhan secara materi dan kasih sayang kepada anak secara menyeluruh, dan kedekatan emosi antara ayah dan anak, serta rekam jejak ayah dalam merawat sang anak. hal ini dilakukan serta merta demi terwujudnya kesejahteraan anak.

Dalam putusan yang memberikan hak asuh anak kepada ke ayah, hakim telah mempertimbangkan siapa yang berhak mendapat hak asuh. Berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Seseorang dapat dicabut hak pengasuhannya terhadap anak dengan keputusan pengadilan jika terbukti: 1). melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, dan 2). Berkelakuan buruk sekali.

Pada pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hak asuh yang awalnya menjadi hak dan kewenangan ibu, dapat beralih ke ayah dengan beberapa sebab. Pertama, apabila sang mantan istri terbukti melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; kedua terbukti telah berperilaku atau memiliki perilaku yang buruk sekali, sehingga mengkhawatirkan bagi tumbuh kembang anak secara fisik dan psikologisnya. Jatuhnya hak asuh anak kepada ayah pada prinsipnya adalah mengutamakan kepentingan anak dalam hal pengasuhan dan perlindungan. Hal ini menjadi spirit dari pasal 14 Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Ivana dan Cahyaningsih, 2020).

Meskipun telah bercerai, pengasuhan dan pemeliharaan anak tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab kedua orang tua, meskipun secara hukum hak pengasuhan anak hanya dimiliki oleh salah satu dari mereka. Bilamana dalam pengasuhan anak terjadi perselisihan, maka hakim yang akan memutuskan kepada siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak. Seperti dalam putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal dan putusan Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Bdg, dimana hakim memutuskan hak asuh anak yang belum mumayyiz dengan hasil yang berbeda. Pada putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal yang dimana hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh ke ibu, sedangkan pada putusan Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Bdg hak asuhnya jatuh ke ayah. berdasarkan dari kedua putusan tersebut, ditemukan persamaan dari kedua putusan ini adalah tergugat sama-sama memiliki *track record* yang buruk. Sedangkan perbedaan mencolok yang ditemukan dalam kedua putusan tersebut adalah pada putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal, ibu (penggugat) dalam positanya meminta uang Dwangsom (uang paksa) sebesar 100.000/hari dari sejak putusan ditetapkan hingga sang anak diserahkan kepada ibu. Pada isi petitum, hakim kemudian mengabulkan Uang Dwangsom sebesar 50.000/hari dari sejak putusan ditetapkan hingga sang anak diserahkan kepada ibu. Hal ini yang kemudian menjadi pertanyaan mengapa dengan kasus yang sama hakim memutuskan hak asuh anak yang berbeda antara putusan dari Pengadilan Agama Palu dan Pengadilan Agama Badung, serta kemudian apa saja aspek yang membedakan dari kedua putusan tersebut.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sebelumnya juga membahas tentang hak asuh anak, diantaranya riset yang dilakukan oleh Nisa Nur Amalia dan kawan-kawan menganalisis putusan Pengadilan Agama Surabaya yang memutuskan perkara berdasarkan juga pada pertimbangan hukum adat (Amalia et al., 2018). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dhiauddin Tanjung dan kawan-kawan meneliti tentang penyelesaian sengketa hak asuh anak yang disebabkan oleh kematian

pada perkara nomor 122/Pdt.G/2019/PA. Jmb dan karena cerai talak pada perkara nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Mdn, sekaligus menganalisis putusan tersebut dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan KHI (Tanjung et al., 2019). Selanjutnya riset yang dilakukan oleh Kamarusdiana dan kawan-kawan yang mengkaji tentang pertimbangan hakim pada dua putusan tersebut serta menganalisis hukum pengasuhan anak dan evaluasi hakim (Kamarusdiana et al., 2021).

Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang hanya membahas pertimbangan hakim dalam putusan hak asuh, penelitian ini secara spesifik membandingkan dua putusan dengan fokus pada penekanan hukumnya dari kedua putusan tersebut, yaitu putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal dan Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Bdg. serta analisis berdasarkan prinsip masalah dalam putusan perkara hak asuh anak.

Artikel ini memiliki batasan yang dimana hanya membahas sampai pada bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak dan apa saja unsur dalam putusan kedua hakim tersebut yang dimana hasil putusannya berbeda. Dalam salah satu putusan disebutkan bahwa hakim mengabulkan salah satu gugatan penggugat untuk ditetapkan hukum uang paksa *dwangsong* sebesar Rp.50.000,- per hari, terhitung sejak putusan dikeluarkan. Hal ini tidak peneliti lanjutkan dikarenakan dalam efektivitasnya, penerapan *dwangsong* hanya digunakan oleh hakim untuk sebagai penekanan secara psikis kepada yang terhukum harus melaksanakan putusan hakim secara sukarela. Sedangkan mengenai bagaimana teknik dan prosedur pelaksanaannya dalam praktik peradilan tidak cukup diatur dalam ketentuan tersebut (Basir, 2021). Sehingga sistem *dwangsong* sudah tidak berlaku dalam pengadilan, dan perlu di kaji ulang mengenai sistem *dwangsong* selama ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Disebut demikian sebab data dan bahan yang diperoleh dengan cara mengumpulkan dan dianalisis menggunakan norma hukum yang relevan, seperti dari Undang-undang dan peraturan pemerintahan lainnya (Ivana dan Cahyaningsih, 2020). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus dan perbandingan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah perkara-perkara yang sama dan telah menjadi putusan pengadilan yang *inkracht*, yang selanjutnya dibandingkan antara kedua putusan tersebut untuk mencari persamaan dan perbedaan dalam hakim menimbang putusan tersebut. Penelitian ini juga memperoleh sumber data primer dari dua putusan pengadilan agama yang berbeda, yaitu putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal dan Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Bdg, kemudian Undang-undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahas sekunder untuk mendukung data primer yang diantaranya berasal dari literatur hukum ataupun karya tulis tentang hukum yang relevan dengan pembahasan hak asuh anak. Adapun teknik pengumpulan yang digunakan yaitu menggunakan teknik dokumentasi, yang di mana peneliti akan menggali informasi yang terdapat dalam dokumen dan kemudian dianalisis isi dokumen tersebut untuk menentukan kesimpulan dari isi dokumen tersebut (Rachmawati et al., 2022). Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, dimana data yang telah diperoleh dari dokumen hukum seperti perundang-undangan, akan dikaji, dibandingkan, dan digali secara deskriptif untuk menemukan persamaan dan perbedaannya (Ulya dan Lisaniyah, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Posisi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal dan Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Bdg

Pengadilan Agama Palu telah menerima pengajuan gugatan hak asuh anak yang diajukan pada tanggal 1 Juni 2016 dengan register Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal oleh Lyliek Andriyani yang merupakan mantan istri bertindak sebagai Penggugat melawan Purnawan, mantan suami yang menjadi pihak Tergugat. Duduk perkara gugatan hak asuh anak ini berawal dari kekhawatiran Penggugat pada kondisi sang anak karena dinilai Tergugat tidak mampu untuk mengasuh serta menjaga anaknya dengan baik dengan beberapa alasan, yang diantaranya Tergugat yang acuh dengan pendidikan sang anak, kemudian lingkungan sekitar tempat tinggal Tergugat yang dirasa tidak aman menurut Penggugat. Selain itu, Tergugat yang diketahui pernah mendekam di penjara karena tersandung masalah narkoba dan selama dalam pengasuhan Tergugat. Tergugat beserta anaknya juga sering pulang hingga larut malam, sehingga kondisi fisiknya yang menurun dan seperti kurang terurus. Diketahui, bahwa Tergugat telah mengambil hak asuh secara sepihak sejak 5 bulan yang lalu. Dalam dalil gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan untuk menerima dan mengabulkan gugatannya, dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- serta Penggugat juga meminta agar Tergugat untuk menanggung biaya sekolah anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,-/per-bulan. Berdasarkan bukti-bukti dan pernyataan dari para saksi serta atas pertimbangan hukum, maka hakim menetapkan putusan yang dibacakan di persidangan dengan amar putusan mengabulkan gugatan dan menetapkan hak asuh anak yang bernama Indra Putra Purnawan yang lahir pada tanggal 5 November 2009 di bawah pengasuhan Penggugat, serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat, dengan membayar uang paksa (dwangsong) setiap hari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejak putusan berkekuatan hukum.

Kemudian, pada putusan Pengadilan Agama Badung telah menerima surat gugatan pada tanggal 26 Mei 2015 dengan nomor register 0069/Pdt.G/2015/PA.Bdg dalam perkara gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh saudara Timothy Adhithia yang kemudian disebut sebagai Penggugat, dan saudari Aisyah Rismasari yang kemudian disebut sebagai Tergugat. Duduk perkara dalam perkara hak asuh anak ini berawal dari keinginan Penggugat untuk membawa serta anak mereka ke Bandung karena Penggugat sudah mendapatkan pekerjaan disana sebagai wiraswasta garmen, karena prospek kerjanya lebih baik di sana. Kemudian ibu Penggugat sudah berusia lanjut sehingga membutuhkan orang lain untuk menemainya. Lalu alasan berikutnya karena lingkungan di sana yang lebih baik untuk anak Penggugat dan Tergugat. Hal ini sudah direncanakan sejak bulan Juni 2015. Sebelumnya, Penggugat dan Tergugat mulai berpisah sejak Februari 2014 dan telah resmi bercerai pada 21 Mei 2015. Dari hasil pernikahan mereka, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 4 Desember 2008. Sehingga pada saat Penggugat dan Tergugat bercerai, usia anak masih dalam usia yang belum *mumayyiz*.

Dalam Pemeliharaan anak, antara Penggugat dan Tergugat membagi dengan durasi selama 5 hari dengan Penggugat dan 2 Hari dengan Tergugat. Namun karena alasan jarak antara rumah Tergugat dengan sekolah yang jauh, sehingga Tergugat meminta durasi waktu anak bersama dengan Tergugat terhitung sejak hari Jumat siang saat pulang sekolah hingga Senin pagi saat berangkat sekolah. Berdasarkan bukti-bukti dan pernyataan dari para saksi, maka hakim menetapkan putusan yang dibacakan di persidangan dengan amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat, dan menetapkan anak dari Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai usia anak tersebut dewasa karena Tergugat selaku ibu kandung berpotensi memiliki perilaku yang buruk dan khawatir jika akan memberi dampak bagi sang anak kedepannya.

2. Analisis Perbandingan Hakim Dalam Putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal dan Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Bdg.

Perbandingan ini dilakukan untuk melihat persamaan dan perbedaan dalam dasar hukum yang digunakan oleh Hakim. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana masing-masing hakim dapat menilai suatu perkara dan menerapkan ketentuan terkait hak asuh anak (Aminah dan Yazidah, 2018).

Berikut ini akan dijelaskan temuan yang terdapat dalam Putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal dan Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Bdg.

Unsur Perbandingan	Putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal	Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Bdg
Fakta Hukum	Penggugat (ibu) mengajukan hak asuh anak	Penggugat (ayah) mengajukan hak asuh anak
Pertimbangan Yuridis	R.Bg Pasal 154 ayat 1 PERMA No. 1/ th 2016 KHI Pasal 105 Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 906K/Sip/1973 Kitab Bajuri juz II halaman 195,	R.Bg Pasal 142 ayat 1 dan Pasal 154 ayat 1, Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1, Pasal 283 dan 309 UU No. 50/th 2009 UU No. 23/th 2002 Pasal 2 UU No. 35/2014 UU No. 1/1974 pasal 41(a) UU No. 35 /2014 Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. 11/th 2008 Pasal 5 ayat (1) dan (2) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1/ th 2008 Pasal 7 ayat 1 KHI Pasal 105 dan Pasal 156 KUHPerdara Pasal 1865

Pertimbangan Non-Yuridis	Anak berusia 7 tahun; tergugat (ayah) tidak memiliki pekerjaan tetap (dipecat dari anggota POLRI); penggugat (ibu) lebih siap mengasuh dan merawat sebab memiliki penghasilan sebagai tenaga honorer	Anak berusia 7 tahun; Pengakuan di persidangan anak ingin ikut penggugat; Penggugat (ayah) lebih siap mengasuh anak; tergugat (ibu) tidak siap mengasuh (memiliki cacat moral)
Penafsiran Hakim Terhadap Pasal tertentu	Tidak ditemukan tafsiran hakim terhadap pasal tertentu.	Pasal 105 KHI dirumuskan berdasarkan pada hadits nabi <i>“anti ahaqqu bihi ma lam tankihiy”</i> .
Putusan Akhir	Hak asuh anak diberikan kepada ibu	Hak asuh anak diberikan kepada ayah

Dari hasil tabel tersebut, ditemukan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut yang kemudian dikelompokkan menjadi lima bagian yaitu Fakta Hukum, Pertimbangan Non-Yuridis, Pertimbangan Non-Yuridis, Penafsiran Hukum, dan Putusan Akhirnya.

Dalam fakta hukum, pada putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal diketahui bahwa penggugat merupakan seorang ibu yang mengajukan gugatan hak asuh anak karena anak tersebut diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat maupun keluarga (Ulya and Lisaniyah, 2021). Sementara itu, pada putusan Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Bdg, Penggugat merupakan seorang ayah yang mengajukan hak asuh anak karena Tergugat dianggap lalai, memiliki perilaku yang tidak baik, kemudian menjalin hubungan dengan pria lain sebelum resmi bercerai, dan pernah mengatakan bahwa tergugat tidak sanggup jika harus mengurus anak seorang diri.

Sehingga perbedaan dari kedua putusan tersebut terletak pada Penggugat yang mengajukan gugatan tersebut.

Dalam pertimbangan yuridis, pada putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal, hakim merujuk pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Mahkamah Agung Nomor 906K/Sip/1973, Pasal 1554 R.Bg dan dengan dalil syar'i. Berbeda dengan putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal, pada putusan Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Bdg Hakim Merujuk Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, lalu Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 huruf (a); Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, serta beberapa pasal terkait lainnya. Perbedaannya terletak pada penggunaan dasar hukum yang sering kali terjadi karena adanya kombinasi faktor, serta perbedaan pandangan dan penafsiran hakim.

Selain pertimbangan secara yuridis, hakim juga perlu untuk menimbang dari aspek non-yuridisnya. Seperti pada putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal, anak menjadi kurang terurus dan kesehatannya menurun sejak dibawah pengasuhan Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan lingkungan rumahnya yang kurang memadai. Hakim juga menilai kondisi ekonomi Penggugat dinilai lebih siap mengasuh dan merawat sebab berpenghasilan sebagai tenaga honorer. Kemudian pada putusan Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Bdg, saat dihadirkan dalam persidangan, anak tersebut kemudian menyatakan ingin ikut dengan penggugat. Sebab, Penggugat lebih dominan dalam pengasuhan sehingga terjalin emosional yang kuat antara ayah dan anak. Tergugat juga memiliki perilaku yang berisiko bagi anak. Hakim juga menambahkan pandangan ahli (*obiter dicta*) dalam putusan tersebut guna memberikan pandangan tambahan yang dapat memperkuat pertimbangan hokum (Tauda, 2024). Sehingga dapat kita ketahui persamaan dari kedua putusan ini adalah pihak tergugat memiliki perilaku yang berisiko bagi anak.

Terdapat perbedaan yang mencolok dalam penafsiran hakim terhadap kedua putusan tersebut. Dalam putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal, hakim tidak menyertakan penafsiran terhadap pasal tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mengadili perkara tersebut hanya berdasarkan dari fakta yang ditemukan selama persidangan. Sehingga dalam putusan ini, hakim memberikan hak pengasuhan anak kepada ibunya. Sementara pada putusan Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Bdg, hakim menafsirkan Pasal 105 KHI dalam hadits nabi “*anti ahaqqu bihi ma lam tankihiy*” yang artinya “kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah” (Dawud, t.t).

Pada saat hadits tersebut muncul, ibu dianggap lebih mampu untuk mengasuh dan mendidik anak selama belum menikah lagi. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa ibu memiliki naluri kasih sayang dan perhatian yang lebih besar, serta lebih banyak waktu dirumah untuk mengasuh anak, sedangkan suami harus mencari nafkah diluar rumah (Azani dan Cysillia, 2022). Dalam kasus ini, hakim juga mempertimbangkan kondisi tergugat (ibu) yang diduga memiliki perilaku yang berpotensi membahayakan bagi tumbuh kembang anak. Hadits tersebut perlu dipahami secara kontekstual dengan kondisi saat ini bahwa hak asuh anak ditentukan bukan secara gender namun ditentukan seberapa besar kemungkinan kepentingan anak dapat terwujud, selain dalam hal yang bersifat kodrati, seperti mendapatkan air susu ibu. Dengan demikian hadits “*anti ahaqqu bihi ma lam tankihiy*” menjadi tidak relevan untuk mendukung hak asuh anak terhadap tergugat sebab perilakunya yang dianggap telah menggugurkan hak *ḥaḍḥānah* itu sendiri (Rusmana dan Indrapradja, 2024).

Penafsiran ini menunjukkan bahwa hakim juga menggunakan dalil syar’i sebagai salah satu landasan untuk memberikan hak asuh kepada ayah, selain menggunakan pertimbangan secara yuridis dan non-yuridis. Perbedaan ini menggambarkan bagaimana pendekatan hakim dalam menafsirkan sebuah hukum

atau dalil, dapat berpengaruh dalam hasil akhir putusan. Baik dalam aspek legalitas maupun pertimbangan maslahat bagi anak (Widanengsih dan Maryandi, 2022).

Dalam hal ini, meskipun kedua putusan memiliki perkara yang sama, namun dari hasil putusan hakim justru menunjukkan perbedaan. Perbedaan putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal dan Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Bdg dapat disebabkan oleh perbedaan cara penafsiran hakim dalam melihat faktor kesejahteraan anak. sehingga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara. Seperti Dalam putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal, selain faktor yuridis, hakim juga memberikan hak asuh kepada ibu karena hakim mempertimbangkan dari aspek psikologis dan kasih sayang ibu kepada anak. Sementara pada putusan 0069/Pdt.G/2015/PA.Bdg, hakim justru memberikan hak asuh anak kepada ayah sebab hakim menilai bahwa ibu tidak layak untuk mendapatkan hak pengasuhan dikarenakan faktor moralitas. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum hak asuh dapat diberikan kepada ibu, namun di beberapa kondisi tertentu hakim dapat memutuskan sebaliknya selama keputusan yang diambil dianggap lebih membawa masalah bagi anak.

3. Tinjauan Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal dan Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Bdg.

Dalam Hukum Islam, prinsip masalah sangat ditekankan agar keputusan dapat memberi keadilan bagi seluruh pihak. Seperti halnya dalam perkara hak asuh anak, Masalah menjadi prinsip utama untuk menentukan sebuah putusan apakah mampu memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak. Dalam menilai seberapa masalah putusan dapat dilihat dari apakah sejalan dengan penetapan hukum islam, tidak bertentangan dengan *nas*, rasional dan pasti, dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (Herawati, 2014).

Penulis kemudian menggunakan teori masalah terhadap putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal dan Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Bdg untuk menganalisa dari kedua putusan mana yang lebih membawa maslahat (kebaikan), yang dimana dalam gugatan uang paksa (*dwangsang*) pada putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal

dikabulkan oleh hakim, namun pembahasan tersebut (*dwangsong*) tidak diatur dalam undang-undang secara rinci. Hendaknya hukum yang ditegakkan dapat mewujudkan unsur-unsur keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum.

Masalah dalam putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal, fokus hakim terletak pada kebutuhan anak secara emosional dan kebutuhan dasar anak. Pertimbangan utama hakim juga menilai bahwa ibu dianggap lebih mampu memenuhi kebutuhan anak seperti sandang, pangan, pendidikan, dan kasih sayang untuk anak daripada tergugat. Dari putusan ini dapat memberikan manfaat karena mengutamakan kebutuhan perkembangan anak yang biasanya dapat terpenuhi dalam pengasuhan seorang ibu. Namun, kelemahan dalam putusan karena penggunaan *dwangsong* yang dinilai kurang efektif, sebab berpotensi menyimpang dari nilai sosial. Mengingat beban secara psikologis dan finansial yang ditimbulkan pada Tergugat yang belum memiliki pekerjaan tetap.

Kemudian, masalah pada putusan Nomor 0069/Pdt.G/2015/Pa.Bdg lebih menekankan pada hubungan emosional antara Penggugat (ayah) dan anak. Hakim melihat bahwa Penggugat lebih dominan dalam pengasuhan dan memiliki stabilitas emosi yang baik, sehingga mampu memberikan rasa aman pada anak. Hakim juga mempertimbangkan risiko yang kemungkinan terjadi jika anak berada dalam pengasuhan ibu, yang dinilai berpotensi memiliki perilaku yang buruk, sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan anak. Dari putusan ini dapat memberikan manfaat yang besar karena dapat mencegah anak dari kemungkinan buruk yang terjadi di kemudian hari.

Menurut analisis penulis, jika ditinjau dari kemaslahatan, Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Bdg dinilai lebih membawa maslahat sebab dalam hal kepentingan terbaik anak, hakim mempertimbangkan hubungan emosional, stabilitas, dan menghindari potensi buruk yang kemungkinan terjadi dari pengasuhan ibu. Sedangkan pada Putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal, dianggap kurang membawa

masalah karena dampak dari penggunaan *dwangsong* yang dapat menimbulkan beban tambahan lagi, sehingga berpotensi mengurangi nilai masalah bagi orang lain.

Namun jika masalah yang dipertimbangkan adalah keseimbangan untuk para pihak, maka putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal, lebih membawa manfaat karena mempertahankan akses ibu dalam memberikan kasih sayang kepada anak. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal sebenarnya dapat menjadi putusan yang lebih membawa kemaslahatan. Hal ini bisa terwujud jika hakim tidak mengabulkan atau menolak gugatan *dwangsong* dari penggugat, karena sifatnya yang belum jelas sebab belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari apa yang telah penulis uraikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal dan Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Bdg memiliki perkara yang sama yaitu hak asuh anak, namun hasil putusannya menunjukkan perbedaan. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan dari fakta hukum, pertimbangan hakim secara yuridis dan non-yuridis, dan penafsiran/pandangan hakim terhadap pasal tertentu (SAPUTRA and Muhamad Tanto Mulyana, 2022). Untuk menghasilkan putusan yang mengandung nilai kemaslahatan, tentu perlu memperhatikan unsur-unsur dalam masalah, yaitu nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta sejalan dengan hukum islam dan tidak bertentangan dari *nas*. Sehingga, dari putusan yang tepat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* akibat perceraian tidak dapat hanya berpedoman pada Undang-undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam saja, namun juga perlu untuk mempertimbangkan dari faktor lain seperti kondisi orang tua, ekonomi, dan kedekatan emosional antara anak dengan orang tua (Rusmana and Indrapradja, 2023). Berdasarkan dari perbandingan kedua putusan di atas, bahwa secara keseluruhan isi kedua putusan

memiliki perbedaan yang sangat menonjol dari segala aspek, baik itu secara yuridis, non-yuridis dan cara hakim menafsirkan sebuah perkara terhadap suatu hukum tertentu.

Kedua putusan tersebut dinilai sudah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Majelis hakim menekankan bahwa meski telah bercerai, sebagai orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan kasih sayang dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan anak menjadi sebuah prioritas utama terwujudnya kepentingan terbaik anak dalam menetapkan hak asuh anak (Meliani and Indra Budi jaya, 2022).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Tauda, Gunawan. "Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konsitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021)." *IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 1 (2024): 358–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art6>.
- Amalia, Nisa' Nur, Noor Fatimah Mediawati, Emy Rosnawati, and Rifqi Ridlo Phahlevy. "Analisis Yuridis Putusan Hakim No. 3346/Pdt.G/2016/PA.Sby Tentang Ayah Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak." *Res Judicata* 1, no. 3346 (2018): 34–46. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29406/rj.viii.1037>.
- Amelia, Retno, Hasim Purba, Rosnidar Sembiring, and Idha Aprilyana Sembiring. "Kepastian Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Terhadap Istri Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 1 (2024): 731–64.
- Aminah, Siti, and Nok Izatul Yazidah. "Kajian Aritmatika Sosial Dalam Perhitungan Ilmu Faraidh (Ilmu Waris) Dalam QS. An-Nisa." *PRISMATIKA: Jurnal Pendidikan Dan Riset Matematika* 1, no. 1 (2018): 50–56. <https://doi.org/10.33503/prismatika.viii.303>.
- Auliana, Nadya. "Faktor-Faktor Penyebab Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Terhadap Pemeliharaan Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Sebagai Akibat Perceraian (Studi Kasus Perceraian No.823/Pdt.G/2011/PA.Mlg Di Pengadilan Agama Malang." *Jurnal Fakultas Mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya* 1, no. 823 (2013): 2–23.
- Azani, Muhammad Azani, and Cysillia Anggaraini Novalis Cysillia. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru." *Jotika Research in Business Law* 1, no. 2 (2022): 46–59. <https://doi.org/10.56445/jrbl.vii2.43>.
- Basir, Cik. "Mengkaji Ulang Penerapan Lembaga Dwangsom Dalam Praktik Peradilan

- Di Indonesia (Sebuah Otoritik).” Pengadilan Agama Tangerang, 2021.
- “Data Kasus Anak Korban Pengasuhan Bermasalah Tinggi: KPAI Lakukan Advokasi” diakses Tanggal 13 Agustus 2024,” n.d.
<https://www.kpai.go.id/publikasi/data-kasus-anak-korban-pengasuhan-bermasalah-tinggi-kpai-lakukan-advokasi>.
- Herawati, Hj Andi. “MASLAHAT MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM AL-GHAZALI (STUDI PERBANDINGAN).” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 12, no. 1 (2014): 42–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v12i1.194>.
- Ivana, Renita, and Diana Tantri Cahyaningsih. “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak.” *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 295. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48423>.
- Kamarusdiana, Najla Nurul Aini, and Muhammad Ishar Helmi. “Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz; Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 0018/Pdt.G/2017Pa. Mrb Dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1476/Pdt.G/2017/Pa. JT.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2021): 247–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1000>.
- Maryati, Maryati. “Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Suami Selaku Pemohon Pada Pengadilan Agama Jambi.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, Jambi* 21, no. 3 (2021): 1299–1331. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1740>.
- Meliani, and Indra Budi jaya. “Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak Analisis Norma Hukum.” *Fastabiq: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2022): 56–68.
- Rachmawati, Ira Yuni, Agus Purnomo, and Khoirun Nisa Aprilian Agmar. “Problematika Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama.” *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 1 (2022): 29–45. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1188>.
- Rusmana, Akbar Mulyadi, and Irwan Saleh Indrapradja. “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak

- Kepada Ayahnya Menurut Hukum Positif Indonesia Dalam Perkara Nomor 4074 / Pdt . G / 2023 / Pa . Bdg Usulan Penelitian Hukum.” *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 11694–701.
- SAPUTRA, ALDI, and Muhamad Tanto Mulyana. “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 2022. <https://doi.org/10.35706/djd.v2i1.6384>.
- Tanjung, Dhiauddin, Mhd Yadi Harahap, and Fadlan Fuadi. “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam).” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 105 (2019): 581–600. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/2060>.
- Ulya, Fawzia Hidayatul, and Fashi Hatul Lisaniyah. “Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (2021): 101–17.
- “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, 1–15.
- Widanengsih, Ajeng, and Yandi Maryandi. “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Mengenai Hak Asuh Anak Kepada Ayah.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2, no.1(2022): 53–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.904>.